



**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

GAWANGI KONSULTASI KE BPK

## Pembangunan Kewilayahan Diupayakan Tetap Berjalan

**YOGYA (KR)** - Hingga paruh tahun ini program pembangunan kewilayahan masih terjadi polemik. Terutama berkaitan pekerjaan infrastruktur jalan kampung yang telah diusulkan melalui musrenbang. Program tersebut diupayakan tetap dijalankan tahun ini sesuai perencanaan anggaran.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Yogya yang juga Sekretaris Komisi A Marwoto Hadi SH, mengungkapkan sesuai tugasannya pihaknya menjembatani persoalan yang tengah terjadi tersebut.

"Saat ini kami tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian untuk dapat berkonsultasi ke sana. Kami akan ajak rekan kerja di eksekutif serta perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)," terangnya.

Polemik itu terjadi berkaitan dengan proses penganggaran. Berdasarkan hasil evaluasi anggaran terkait belanja modal, terutama menyangkut penanangan jalan di wilayah harus

**Marwoto Hadi SH**  
Fraksi Partai Gerindra

KR-Istimewa

perorangan sehingga turut menjadi kendala.

Marwoto mengaku, pihaknya lantas mengundang berbagai pihak mulai dari instansi terkait di Pemkot serta perwakilan LPMK guna mencari solusi terbaik. Menurutnya, unsur kehati-hatian tetap perlu dikedepankan agar kelak tidak menimbulkan persoalan.

"Semangatnya adalah bagaimana program yang sudah direncanakan dan sangat dibutuhkan bagi wilayah ini bisa berjalan sesuai rencana. Namun unsur kehati-hatian juga perlu kita kedepankan," tandasnya.

Jika dengan skema belanja modal maka arahnya Pemkot Yogya membuat surat kerelaan dari pemilik lahan namun itu disertai dengan penyerahan aset. Kekhawatiran Komisi A serta LPMK, imbuh Marwoto, penolakan dari masyarakat akan besar. Apalagi sosialisasi terkait rencana itu juga sudah berjalan. Oleh karena itu secepatnya perlu ada konsultasi ke BPK serta Kemenkumhan yang bakal difasilitasi oleh komisinya. **(Dhi)-f**

berada di atas lahan pemerintah. Padahal jalan kampung sifatnya ialah jalan rukun atau sebagian besar masuk dalam persil warga. Jika akan ditangani menggunakan APBD melalui pos belanja modal maka perlu ada kerelaan dari pemilik persil untuk diserahkan ke pemerintah. Sebaliknya, ketika diubah menjadi belanja hibah, maka pengajuan atau penerima tidak bisa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005